

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan ini akan disajikan sebagai berikut, yang pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar variabel yang diteliti, yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Setelah itu peneliti akan membahas tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan tentang model variabel, lalu diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan mengacu pada tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di antara individu atau rumah tangga dalam suatu masyarakat. Menurut *International Monetary Fund (IMF)*, “*income inequality refers to the extent to which income is unevenly distributed within a population*”. Dengan demikian, ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan absolut antara kelompok kaya dan miskin, tetapi juga melibatkan struktur distribusi pendapatan secara keseluruhan seperti proporsi total pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok pendapatan tertinggi dibandingkan kelompok pendapatan terendah, serta peran mobilitas ekonomi dan kesempatan dalam membentuk pola tersebut. Dalam penelitian ini, ketimpangan pendapatan diukur secara operasional menggunakan koefisien Gini, berdasarkan data distribusi pendapatan Indonesia dari tahun 2002 hingga 2024.

2.1.1.1 Teori Kuznets

Kuznets mengemukakan sebuah hipotesis yang menjelaskan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduknya yang berbentuk kurva U terbalik. Artinya, pada tahap awal proses pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, namun seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya pembangunan, tingkat kesenjangan tersebut akan berangsur menurun. Pada fase tertentu, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan berangsur menurun seiring dengan perkembangan ekonomi yang lebih merata.

Kuznets menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, proses pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Namun, ketika pembangunan mencapai titik tertentu, pertumbuhan ekonomi justru berperan dalam menurunkan tingkat ketimpangan atau memperbaiki nilai Gini rasio (Al & Subrata, 2018).

2.1.1.2 Teori Distribusi dan kebijakan publik

Dalam perspektif teori distribusi pendapatan, belanja publik yang mencakup pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah memegang peranan penting dalam membentuk pola distribusi pendapatan masyarakat. Kebijakan publik yang diwujudkan melalui belanja sosial, belanja pendidikan, kebijakan perpajakan, serta regulasi pasar tenaga kerja merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa belanja publik memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, meskipun dampaknya bervariasi antar wilayah dan jenis belanja. Penelitian oleh (Yuliani et al., 2024) menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial dan pajak daerah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja pendidikan menunjukkan pengaruh positif namun belum signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaannya di tingkat pemerintah daerah. Studi lain juga menunjukkan bahwa alokasi belanja publik pada sektor sosial, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih dipengaruhi oleh kapasitas pengelolaan anggaran, kualitas institusi, serta karakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah (Wahyudi, 2023).

Penelitian oleh (Sarjito, 2023) menegaskan bahwa program bantuan sosial dan kebijakan kesejahteraan yang dibiayai melalui belanja publik dapat menurunkan kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan apabila dirancang dan diimplementasikan secara tepat. Oleh karena itu, analisis terhadap variabel jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan belanja publik menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah efektif dalam mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil.

2.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk tidak hanya merepresentasikan besaran populasi secara agregat, tetapi juga mencerminkan pola distribusi penduduk dan kualitas sumber daya manusia antarwilayah. Dalam konteks kebijakan publik, permasalahan kependudukan lebih berkaitan dengan ketimpangan distribusi penduduk, konsentrasi urban, serta ketidakmerataan akses pendidikan dan layanan publik, yang pada akhirnya mempengaruhi distribusi pendapatan. Secara Operasional, Variabel jumlah penduduk di ukur sebagai total populasi Indonesia pada akhir setiap tahun dalam rentang waktu 2002 – 2024 (misalnya dalam satuan juta jiwa). Selain itu, bila memungkinkan laju pertumbuhan penduduk tahunan juga dapat dihitung sebagai variabel pelengkap.

2.1.2.1 Teori Transisi Demografi (Notestein, 1945)

Teori transisi demografi yang dikemukakan oleh Notestein (1945) menjelaskan perubahan struktur penduduk dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat yang lebih rendah seiring dengan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Teori ini kemudian dikembangkan dalam literatur kependudukan modern yang menekankan peran pendidikan, urbanisasi, serta intervensi kebijakan publik dalam mempercepat proses transisi demografis, khususnya di negara berkembang (Lee & Mason, 2010). proses transisi demografi berimplikasi pada perubahan struktur usia penduduk, konsentrasi penduduk di wilayah tertentu, serta meningkatnya kebutuhan terhadap kebijakan pendidikan dan pasar tenaga kerja yang inklusif.

Penelitian oleh (Rostiana & Rodesbi, 2020) negara memiliki potensi keuntungan ekonomi karena sebagian besar masyarakat berada dalam usia produktif jika tersedia lapangan kerja dan kapasitas investasi yang memadai. Sebaliknya, apabila bonus demografi tidak dimanfaatkan secara optimal, seperti terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi jebakan demografi yang dapat memperbesar ketimpangan pendapatan.

2.1.2.2 Teori Penduduk Optimum (Carr-Saunders, 1930)

Jumlah penduduk yang besar dapat menciptakan tekanan terhadap sumber daya dan kesempatan kerja, yang berpotensi memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan, tergantung pada kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan, sehingga pendapatan masyarakat kota cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk di daerah pedesaan. Kondisi ini dapat memperlebar disparitas pendapatan antarwilayah apabila pembangunan di daerah tertinggal tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan kesempatan ekonomi yang merata. Namun, hasil empiris di beberapa daerah menunjukkan dinamika yang berbeda.

Penelitian menurut (Refkhi et al., 2024) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti bahwa populasi yang besar dapat berkontribusi pada pemerataan pendapatan apabila disertai dengan pemerataan pembangunan dan distribusi aktivitas ekonomi yang seimbang.

2.1.2.3 Teori Thomas Malthus 1798

Teori Pertumbuhan Penduduk Malthus yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus dalam *An Essay on the Principle of Population* (1798) menjelaskan bahwa penduduk cenderung tumbuh secara geometris, sedangkan kemampuan produksi pangan dan sumber daya alam meningkat secara aritmetis. Ketidakseimbangan ini menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya, yang berpotensi menimbulkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini relevan karena pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak selalu diimbangi oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja maupun pemerataan kesempatan ekonomi.

Penelitian (Raharto, 2020), menunjukkan bahwa tekanan populasi yang besar tanpa disertai strategi pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, terutama di wilayah padat penduduk seperti Jawa dan Sumatera. Hal ini menegaskan bahwa teori Malthus masih memberikan dasar konseptual yang penting untuk memahami dinamika penduduk dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Selain itu penelitian oleh (Subair, 2015) dalam jurnal *DIALEKTIKA* menekankan bahwa meskipun teknologi dan inovasi meningkatkan kapasitas produksi, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi kualitas SDM, pendidikan, dan lapangan kerja tetap dapat memperbesar ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, teori Malthus tidak hanya bersifat historis, tetapi juga menjadi dasar bagi kebijakan pengendalian penduduk dan

peningkatan kualitas manusia, seperti melalui keluarga berencana, pendidikan, dan pemerataan lapangan kerja, untuk mengurangi dampak negatif pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur melalui perubahan output nasional, yang diwakili sebagai Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa secara bertahap. Investasi dalam infrastruktur dan sumber daya manusia, inovasi teknologi, ketersediaan sumber daya alam, dan stabilitas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan dampaknya yang langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menghasilkan peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Menurut (Soleh et al., 2011) pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, yang mencerminkan perkembangan kemampuan suatu perekonomian menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa pertumbuhan tidak hanya sekadar peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga harus dilihat dari dinamika jumlah penduduk dan kemampuan internal perekonomian dalam memperluas kapasitas produksinya. Sedangkan menurut Dumairy (2006), pertumbuhan ekonomi hanya dilihat melalui

peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa mempertimbangkan seberapa besar kenaikan tersebut dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hanya dilihat melalui peningkatan PDB tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas.

2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

Teori pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai suatu kerangka yang menjelaskan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan output per kapita dalam jangka Panjang. Teori ini tidak hanya mengidentifikasi komponen penting yang memengaruhi pertumbuhan, tetapi juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja sama untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, teori pertumbuhan ekonomi adalah cerita logis yang menggambarkan bagaimana pertumbuhan terjadi dan menghubungkan berbagai elemen ekonomi. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari kombinasi rencana antara investasi, inovasi, kebijakan pemerintah, dan komponen sosial lainnya yang saling memengaruhi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari peningkatan PDB, tetapi juga dari kemampuannya dalam menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Para ekonom klasik menekankan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mereka berpendapat bahwa ada empat komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, jumlah penduduk, dan tingkat teknologi yang digunakan. Pada awalnya, ketika jumlah penduduk masih sedikit dan sumber daya alam melimpah, pengembalian investasi cenderung tinggi, mendorong lebih banyak investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, produktivitas per orang dapat menurun seiring dengan pertumbuhan penduduk, yang dapat berdampak negatif pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi akan mencapai titik jenuh, atau "stasioner", di mana pendapatan pekerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pandangan ini, setiap masyarakat tidak dapat menghindari kemungkinan terjadinya stagnasi ekonomi. Dari penjelasan tersebut muncul teori yang dikenal sebagai teori penduduk optimum. Menurut teori ini, ketika jumlah penduduk optimal menghasilkan produksi marjinal yang sama dengan pendapatan per kapita maksimum, jumlah penduduk mencapai puncaknya dan disebut sebagai penduduk optimum.

2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan pandangan Keynes maupun model Harrod-Domar. Pendekatan ini berfokus pada sisi penawaran dalam menjelaskan proses pertumbuhan ekonomi. Dikembangkan oleh Abramovitz dan Solow, teori ini

menekankan bahwa peningkatan output ekonomi tidak hanya ditentukan oleh permintaan agregat, tetapi juga oleh perkembangan faktor-faktor produksi seperti akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dalam pandangan neoklasik merupakan hasil dari efisiensi dan produktivitas yang meningkat di sektor produksi, bukan semata-mata akibat naiknya permintaan barang dan jasa (Villanueva, 2023).

Menurut analisis Solow, peningkatan jumlah tenaga kerja dan modal bukanlah satu-satunya pendorong pertumbuhan ekonomi; kemajuan teknologi serta peningkatan kualitas tenaga kerja justru lebih krusial dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi (Mert, 2021). Teori pertumbuhan neo-klasik tidak bertujuan utama untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi pertumbuhan, melainkan untuk mengimplementasikan kerangka teorinya dalam studi empiris guna mengukur kontribusi setiap faktor produksi terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mendorong kemajuan ekonomi, adalah cara paling umum untuk mengukur kesuksesan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai proses yang berkelanjutan di mana suatu negara mengubah kondisi ekonominya

untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti peningkatan kapasitas pendapatan dan produksi nasional, serta pemerataan kesejahteraan di seluruh masyarakat. Untuk memastikan bahwa semua warga negara menikmati keuntungan dari kemajuan ekonomi yang dicapai, pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ini.

2.1.3.3 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting. Sejauh mana aktivitas ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu disebut pertumbuhan ekonomi. Karena aktivitas perekonomian pada dasarnya adalah proses menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan output, yang diukur dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) (Arsyad, 2006).

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dapat dilihat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$G = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G = Laju pertumbuhan ekonomi

Y_t = Produk domestik bruto (PDB rill) pada tahun t

t = Tahun berjalan

Y_{t-1} = Produk domestik bruto (PDB rill) pada tahun t-1

t-1 = Tahun sebelumnya

2.1.4 Belanja Publik

Belanja Publik atau pengeluaran pemerintah (*public expenditure/government spending*) merujuk pada seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi ekonomi, sosial, dan administratif guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengertian klasik kebijakan fiskal, menurut (Musgrave & Musgrave, 1989), belanja publik memiliki fungsi utama alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa publik, fungsi distribusi dengan redistribusi pendapatan melalui transfer sosial, dan fungsi stabilisasi dengan menjaga kestabilan makroekonomi.

1. Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik yang dikembangkan oleh Richard A. Musgrave menegaskan bahwa pemerintah memainkan peran tiga fungsi utama dalam perekonomian: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mencakup penyediaan barang publik dan layanan yang tidak disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar, fungsi distribusi menyentuh pada bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan melalui peran fiskal pemerintah, sedangkan fungsi stabilisasi berhubungan dengan peran pemerintah dalam menyeimbangkan siklus ekonomi dan menjaga stabilitas makro (Kimea & Kiangi, 2018). Dalam konteks redistribusi pendapatan, Musgrave menekankan intervensi fiskal pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dan ketidaksetaraan distribusi

faktor produksi. Belanja publik dan kebijakan fiskal jadi alat utama mengurangi ketimpangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sedangkan Secara praktis, teori Musgrave menunjukkan bahwa skala dan jenis belanja public baik jumlahnya maupun alokasinya ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat memengaruhi pembentukan distribusi pendapatan. Jika belanja diarahkan efektif ke sektor produktif dan pemerataan wilayah, fungsi distribusi dan alokasi bisa bersinergi menekan ketimpangan. Sebaliknya, jika belanja lebih rutin atau terkonsentrasi di daerah maju, alokasi bisa kuat tanpa distribusi yang cukup, sehingga kesenjangan makin lebar.

2. Teori Keynesian

Teori Keynesian dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam karyanya yang berpengaruh, berjudul "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" (1936). Menurut Keynes, pengeluaran pemerintah atau belanja publik adalah alat utama kebijakan fiskal untuk merangsang ekonomi, meningkatkan permintaan keseluruhan, dan mengatasi masalah pengangguran. Ia menolak pandangan klasik yang mengatakan pasar bisa secara otomatis menyesuaikan diri menuju keseimbangan penuh pekerjaan. Keynes berpendapat bahwa dalam kondisi resesi atau permintaan yang rendah, intervensi aktif pemerintah melalui belanja publik sangat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Dalam kerangka model multiplier Keynesian, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah publik dapat memicu dampak berlipat ganda pada ekonomi. Konsep efek multiplier menjelaskan bahwa peningkatan satu unit belanja negara mampu menghasilkan kenaikan pendapatan domestik lebih dari satu unit, berkat

rangkaian lanjutan dari konsumsi dan investasi. Dengan demikian, belanja publik yang diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempersempit kesenjangan pendapatan. Pandangan ini diperkuat oleh penelitian yang menegaskan bahwa pemikiran Keynesian tetap relevan untuk perekonomian modern, terutama dalam konteks kebijakan fiskal pemerintah Indonesia yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan.

Selain itu, Teori Keynesian menyoroti peran stabilisasi fiskal (*fiscal stabilization*) di mana belanja negara berperan sebagai instrumen untuk mengatur gejolak perekonomian. Selama periode resesi, pemerintah perlu menaikkan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan permintaan keseluruhan dan menghasilkan kesempatan kerja, sementara di fase ekspansi ekonomi, pemerintah dapat menurunkan belanja untuk membendung inflasi. Di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam kebijakan fiskal kontra-siklus yang dilaksanakan lewat program stimulus dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penelitian Widodo dalam laporan Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional mengungkapkan bahwa pengeluaran negara yang ditujukan ke program padat karya dan subsidi sosial terbukti ampuh mempertahankan kemampuan belanja dan menghindari eskalasi kesenjangan saat pandemi COVID-19.

Menurut penelitian (Yunisvita, 2013) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah yang tidak tepat alokasi dapat mengurangi efektivitas multiplier effect, terutama jika didominasi oleh belanja rutin dibanding belanja modal

produktif. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan teori Keynesian sangat bergantung pada kualitas kebijakan fiskal dan efektivitas tata kelola keuangan publik.

3. Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner's Law

Teori *Wagner's Law* pertama kali dikemukakan oleh Adolph Wagner (1890) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan nasional dan proses modernisasi ekonomi. Menurut Wagner, industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Dengan demikian, semakin tinggi pendapatan suatu negara, semakin besar pula peran dan pengeluaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik. Hukum Wagner menegaskan bahwa pengeluaran publik bukanlah penyebab pertumbuhan ekonomi, tetapi konsekuensi dari kemajuan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa publik (Sukartini & Saleh, 2012).

Dalam ranah ekonomi publik, teori tersebut menyatakan bahwa pengeluaran negara mempunyai tiga peran pokok, yakni peran pengalokasian sumber daya, peran pembagian penghasilan, dan peran penstabilan perekonomian. Saat ekonomi berkembang dan masyarakat makin makmur, kebutuhan akan jasa publik naik, mendorong perluasan belanja pemerintah. Sebaliknya, apabila pengeluaran negara disalurkan secara efektif ke bidang produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, maka belanja publik mampu bertindak

sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang menekan disparitas ekonomi antarwilayah dan antarkelompok sosial. Akan tetapi, jika penyaluran belanja publik lebih banyak tersedot untuk pengeluaran rutin atau birokrasi yang kurang produktif, maka kenaikan pengeluaran tidak akan memberikan dampak besar terhadap pemerataan kemakmuran.

Bukti empiris di Indonesia menunjukkan hasil yang konsisten dengan teori Wagner. Penelitian oleh (Eynes & Eori, 2020) menemukan adanya hubungan jangka panjang antara pertumbuhan PDB dan peningkatan belanja pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mendorong kenaikan pengeluaran publik, karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sosial, infrastruktur, dan program pembangunan. Temuan ini memperkuat pandangan Wagner bahwa seiring dengan kemajuan ekonomi, peran fiskal pemerintah akan semakin besar dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk menjaga stabilitas serta pemerataan ekonomi di masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mengenai “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Publik terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada tahun 2002-2024”, berikut adalah tabel penelitian terdahulu.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No (1)	Judul, Tahun, & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil (5)	Sumber (6)
1	Analisis Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia 2022 (Abdul et al., 2022)	-ketimpangan pendapatan - Pertumbuhan Ekonomi	- jumlah penduduk - belanja publik	Pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketimpangan, sedangkan DAU menurunkannya.	Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Vol.1 No.1, 2022.
2	Analisis Pengaruh Tingkat PDRB PerKapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia periode tahun 2019-2021 2022 (Janah et al., 2022)	- ketimpangan pendapatan	- jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja publik	PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, IPM berpengaruh positif, dan PMA berpengaruh negatif.	Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi Vol.1 No.4, 2022.
3	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openness terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun	- ketimpangan - Pertumbuhan Ekonomi	- jumlah penduduk - belanja publik	Pertumbuhan ekonomi dan investasi asing berpengaruh positif terhadap ketimpangan; trade openness berpengaruh negatif; inflasi	Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> Vol.6 No.2, 2022.

No (1)	Judul, Tahun, & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil (5)	Sumber (6)
	2000-2020 2022 (Wijayanti & Aisyah, 2022)			tidak berpengaruh signifikan.	
4	Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia 2021 (Dwi et al., 2021)	- ketimpangan	- jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja publik	sebelum pandemi, DAK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan; DAU, DBH, FDI, dan tenaga kerja tidak signifikan	jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pendidikan Vol.1 No.2, 2021.
5	<i>Infrastructure and Income Inequality in Indonesia: 2009–2017</i> 2021 (Nurdina, 2021)	ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan pendekatan dan rasio Gini	Fokus penelitian pada pengaruh infrastruktur fisik dan sosial (pendidikan, kesehatan) terhadap ketimpangan	pembangunan infrastruktur fisik dan pendidikan meningkatkan ketimpangan pendapatan, sedangkan infrastruktur kesehatan tidak berpengaruh signifikan.	JISDeP Vol.2 No.2, 2021.
6	Analisis Korelasi antara Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Barat 2022 (Sari & Putri, 2022)	- ketimpangan	- jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja publik	Pengangguran berhubungan positif dengan kemiskinan; ketimpangan berhubungan negatif dengan kemiskinan dan pengangguran. (PDRB)	Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Vol.11 No.2, 2022.
7	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan	- ketimpangan - Pertumbuhan	- jumlah penduduk - belanja publik	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan; IPM	Sinomika Journal, Vol.1 No.4, 2022.

No (1)	Judul, Tahun, & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil (5)	Sumber (6)
	Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi- Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020 2022 (Nurain & Juliannisa, 2022)	Ekonomi		tidak berpengaruh negatif signifikan; UMP berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan.	
8	Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014 2015 (Nangarumba, 2015)	-ketimpangan	- jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja publik	Struktur ekonomi, upah minimum, belanja modal, dan investasi berpengaruh terhadap ketimpangan; belanja modal menurunkan ketimpangan.	JESP: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.7 No.2, 2015
9	Pengaruh Penanaman Modal Asing, Indeks Persepsi Korupsi, Kemiskinan, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia 2023	- ketimpangan	- jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja publik	Hasil menunjukkan bahwa semua variabel (PMA, IPK, Kemiskinan, Pengangguran, dan Upah Minimum) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. PMA, IPK,	Jurnal Akuntansi dan Ekonometrika Vol. 13, No.1 Juni 2023 DOI: 10.37859 /jae.v13i 1.4775

No (1)	Judul, Tahun, & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil (5)	Sumber (6)
	(Di et al., 2022)			Kemiskinan, dan Pengangguran berpengaruh positif, sedangkan Upah Minimum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan.	
10	Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Pendapatan pada Lima Provinsi Tertimpang di Indonesia 2022 (Nangarumba, 2015)	-ketimpangan	- Jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja publik	IPM ,upah minimum, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, Sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan ke empat variabel tersebut berpengaruh terhadap ketimpangan	Equilibrium: Jurnal Ekonomi- <i>Manajemen- Akuntansi</i> , Vol. 18 No. 1, April 2022
11	Analisis Faktor– Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara 2024 (Silaban et al., 2024)	- Ketimpangan	- jumlah penduduk - belanja publik - pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi positif tidak signifikan, IPM negatif signifikan, pengangguran positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan signifikan dengan kontribusi 70,57%.	NIAGAWAN Vol 13 No 1 Maret 2024
12	Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan	- ketimpangan	- jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja	Pendidikan dan kemiskinan berpengaruh signifikan; pengangguran tidak signifikan.	Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 2019, Vol.8, No.3, 250-265

No (1)	Judul, Tahun, & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil (5)	Sumber (6)
	Pendapatan di Indonesia 2019 (Hindun, Ady Soejoto, 2019)		publik	Secara simultan berpengaruh namun hanya menjelaskan 22,37% ketimpangan	
13	Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah 2024 (Pradana et al., 2024)	- ketimpangan - Pertum- buhan Ekonomi	- jumlah penduduk - belanja publik	Pertumbuhan ekonomi menurunkan ketimpangan secara signifikan (hubungan satu arah). Investasi tidak signifikan ke pertumbuhan; PAD signifikan. UMP & IPM menurunkan ketimpangan; konsumsi pemda tidak signifikan.	Jurnal Politik dan Kebijakan Vol. 21 No. 1, Mei 2024
14	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan, Panel Data Enam Provinsi di Pulau Jawa 2019 (Erita, 2019)	- ketimpangan - Pertum- buhan Ekonomi	- jumlah penduduk - belanja publik	rasio pajak, investasi, dan otonomi fiskal daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi, investasi, produktivitas tenaga kerja, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, peningkatan PAD dan pemerataan	Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi, Vol. 9 No.1, April 2019

No (1)	Judul, Tahun, & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil (5)	Sumber (6)
				pembangunan menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.	
15	Analisis Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 2022 (Agape et al., 2022)	- ketimpangan pendapatan	- jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja publik	jumlah pinjaman LKM berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan jumlah LKM dan IPM tidak berpengaruh signifikan. Diperlukan pemerataan LKM dan akses keuangan bagi masyarakat miskin untuk menekan ketimpangan.	Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores, Vol. 12 No.1, Maret 2022
16	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia 2022 (Sani et al., 2022)	- Ketimpangan	- jumlah penduduk - pertumbuhan ekonomi - belanja publik	pandemi Covid-19 meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di perkotaan, namun menurunkan ketimpangan pendapatan karena penurunan pendapatan lebih besar terjadi pada kelompok menengah ke atas.	Ekonomis: <i>Journal of Economics and Business</i> , Vol.6, No.01, Maret (2022)
17	Determinan ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera	- jumlah penduduk - Pertumbuhan Ekonomi	- belanja publik	pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh negatif namun	<i>Journal of Macroeconomic and social development</i> , Vol. 1, No. 02,

No (1)	Judul, Tahun, & Penulis (2)	Persamaan (3)	Perbedaan (4)	Hasil (5)	Sumber (6)
	2023 (Agra Julihanza, 2023)	-ketimpangan		tidak signifikan terhadap ketimpangan, jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif signifikan.	2023,
18	Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial terhadap Ketimpangan di Indonesia 2025 (Rindiani et al., 2025)	- ketimpangan	- jumlah penduduk -belanja publik - pertumbuhan ekonomi	belanja pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan, baik jangka pendek maupun panjang. Pertumbuhan ekonomi menurunkan ketimpangan hanya dalam jangka pendek, sedangkan IPM dan pendapatan per kapita justru meningkatkan ketimpangan dalam jangka panjang.	Jurnal Ekonomi Trisaksi, Vol. 5 No. 1 (2025)
19	<i>Impact of Foreign Direct Investment on Income Inequality: Evidence from Selected Asian Economies</i> 2023 (Yuldashev et al., 2023)	- Ketimpangan - Pertum- buhan Ekonomi	- jumlah penduduk - belanja publik	FDI berpengaruh negatif signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan.	Yuldashev et al., 2023, PLOS ONE, Vol. 18 (2): e0281870
20	Pengeluaran Pemerintah Provinsi dan	- Ketimpangan - Pertum-	- belanja publik	belanja pemerintah untuk	Sebatik Vol. 27 No. 2 Desember 2023

No	Judul, Tahun, & Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia 2023 (Wahyudi, 2023)	buhan Ekonomi		pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan ketimpangan pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan.	

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan konseptual antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan belanja publik terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Kerangka pemikiran yang digunakan menekankan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh aspek demografi, laju pertumbuhan ekonomi, serta peran pemerintah melalui kebijakan fiskal. Pertumbuhan jumlah penduduk berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan lapangan kerja dan akses ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjamin distribusi pendapatan yang merata. Dalam konteks ini, belanja publik berfungsi sebagai alat pemerintah untuk menekan ketimpangan melalui penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan belanja publik ditetapkan sebagai variabel independen yang memengaruhi ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen.

2.3.1 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketimpangan Pendapatan

Secara teoritis, teori transisi demografi menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia akan menimbulkan tekanan struktural terhadap pasar tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya persaingan kerja dan memperbesar proporsi penduduk berpendapatan rendah. Akibatnya, distribusi pendapatan menjadi tidak merata karena sebagian besar penduduk terkonsentrasi pada kelompok berpenghasilan rendah, sementara hanya sebagian kecil yang memperoleh pendapatan tinggi. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kapasitas ekonomi cenderung berdampak pada meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Secara empiris, Penelitian yang dilakukan (Siburian et al., 2024), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai pemerataan kesempatan ekonomi dan akses terhadap pendidikan berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan telaah kepustakaan dan sintesis peneliti, pertumbuhan jumlah penduduk dipahami sebagai faktor struktural yang dapat memperbesar ketimpangan pendapatan apabila tidak diimbangi oleh penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemerataan akses terhadap layanan publik. Oleh karena itu, jumlah penduduk dalam penelitian ini diasumsikan memiliki hubungan kausal terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia.

2.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekspansi output, peningkatan pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja. Namun, efek pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan di antara kelompok masyarakat dan sektor-sektor ekonomi. Teori klasik yang dikemukakan oleh Simon Kuznets (1955) dalam artikelnya "*Economic Growth and Income Inequality*" menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat karena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri, sebelum akhirnya menurun ketika pembangunan ekonomi semakin matang dan kesempatan ekonomi semakin merata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang tidak linear terhadap ketimpangan pendapatan, yaitu berpengaruh positif pada tahap awal pembangunan dan berpengaruh negatif pada tahap lanjutan pembangunan.

Penelitian (Putri & Anggraini, 2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan dapat memperbaiki distribusi pendapatan, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Dengan demikian, temuan tersebut memperkuat bahwa

pertumbuhan ekonomi yang inklusif cenderung berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan.

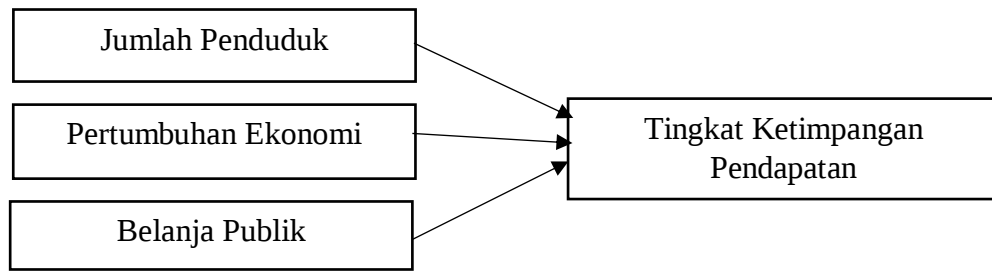
2.3.3 Hubungan Belanja Publik dengan Ketimpangan Pendapatan

Belanja publik yang meliputi pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik, layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta program bantuan sosial, memiliki peran penting dalam memengaruhi pemerataan pendapatan masyarakat. Ketika alokasi belanja pemerintah diarahkan secara tepat pada sektor-sektor yang menjangkau kelompok berpendapatan rendah dan wilayah tertinggal, akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi akan semakin luas. Peningkatan akses tersebut dapat membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan taraf hidupnya, sehingga ketimpangan pendapatan dapat menurun dan kesejahteraan menjadi lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Maulidi & Dawood, 2022) yang berjudul *“Credit, Fiscal Policy, and Income Inequality: Empirical Study from Indonesia”* meneliti pengaruh kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia periode 2010–2020 menggunakan metode GLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah sebagai proksi kebijakan fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan belanja belum efektif dalam mengurangi kesenjangan pendapatan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu, ketimpangan pendapatan dipahami sebagai fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh interaksi faktor demografis, ekonomi, dan kebijakan fiskal. Jumlah penduduk mencerminkan tekanan demografis terhadap ketersediaan lapangan kerja, akses layanan publik, serta distribusi sumber daya. Pertumbuhan ekonomi merepresentasikan kapasitas perekonomian dalam menciptakan nilai tambah dan peningkatan pendapatan, namun tidak selalu menjamin pemerataan apabila manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Sementara itu, belanja publik berperan sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, yang secara teoritis dapat memperkecil kesenjangan apabila diarahkan secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam penelitian ini, ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hubungan antarvariabel dibangun berdasarkan teori Kuznets, teori transisi demografi, serta teori keuangan publik dan Keynesian, yang menekankan bahwa dinamika penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, dan efektivitas pengeluaran pemerintah secara simultan membentuk pola distribusi pendapatan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran disusun untuk menggambarkan hubungan kausal antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan belanja publik terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, baik secara parsial maupun simultan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di paparkan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diduga secara parsial Jumlah Penduduk berpengaruh positif sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Publik berpengaruh negatif terhadap tingkat Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2002 – 2024.
2. Diduga Jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan belanja publik secara bersama berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 2002–2024.